

***CULTURAL SYMBOL* DAN POLITIK IDENTITAS ELIT
DALAM PEMBANGUNAN KOTA SAMPIT**



Oleh:

Thau'am Ma'rufah

NIM: 1420310089

TESIS

Diajukan kepada program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna memperoleh
gelar Magister dalam Ilmu Sosial

Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Dalam Islam

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : THAU'AM MA'RUF AH
NIM : 1420310089
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang disebutkan sumbernya.

Yogyakarta, 11 April 2018

Saya yang menyatakan




Thau'am Ma'rufah
NIM. 1420310089

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

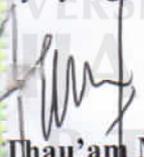
Nama : THAU'AM MA'RUF AH
NIM : 1420310089
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 April 2018

Saya yang menyatakan




Thau'am Ma'rufah
NIM. 1420310089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : *CULTURAL SYMBOL* DAN POLITIK IDENTITAS ELIT
DALAM PEMBANGUNAN KOTA SAMPIT
Nama : Thau'am Ma'rufah, S.Sy
NIM : 1420310089
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam
Tanggal Ujian : 25 April 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sosial
(M.Sos)

Yogyakarta, 06 Juni 2018

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : *CULTURAL SIMBOL* DAN POLITIK IDENTITAS
ELIT DALAM PEMBANGUNAN KOTA SAMPIT
Nama : Thau'am Ma'rufah, S.Sy
NIM : 1420310089
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : HI/SPPI
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Telah disetujui tim penguji ujian Munaqasyah:

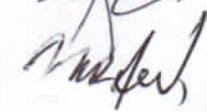
Ketua/penguji : Dr. Roma Ulinuha, M.Hum

( an/Dr. Roma Ulinuha.

Pembimbing/Penguji : Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si

(

Penguji : Dr. Munawar Ahmad, SS., M.Si

(

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 25 April 2018

Waktu : 13.00 – 14.00 WIB

Hasil/nilai : 92 / A

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cum Laude*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

CULTURAL SYMBOL DAN POLITIK IDENTITAS ELIT DALAM PEMBANGUNAN KOTA SAMPIT

Yang ditulis oleh :

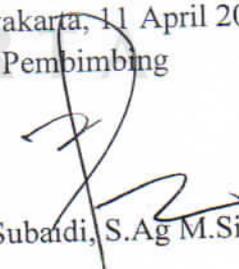
Nama : Thau'am Ma'rufah, S.Sy
NIM : 1420310089
Program Studi : Hukum Syariah
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Sosial.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 April 2018
Pembimbing


Dr. Subardi, S.Ag M.Si

Abstrak

Cultural symbol atau simbolisasi nilai-nilai tertentu dari suatu budaya merupakan tema yang menarik untuk dikaji, apalagi jika dilakukan oleh elit daerah sebagai bentuk politik identitas. Terlebih lagi apabila dilakukan di daerah seperti Sampit yang daerahnya mempunyai tingkat heterogenitas yang cukup tinggi dengan banyaknya suku, agama dan bahasa. Dengan memainkan *cultural symbol* tersebut, Bupati Sampit memunculkan dominasi simbol-simbol Islam, yang menariknya justru menjadikan hal itu sebagai modal popularitasnya sebagai Bupati, terbukti dengan terpilihnya kembali menjadi Bupati Sampit dalam dua periode. Oleh karena itu, problematika yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: *cultural symbol* apa saja yang menjadi politik identitas dalam pembangunan Sampit? Kemudian nilai-nilai apa saja yang mengobsesi tindakan tersebut? Dan bagaimana proses *cultural symbol* itu sebagai politik identitas dalam pembangunan Sampit

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori interaksionisme simbolik dengan pendekatan sosiologi politik yang mana titik tekan kajian ini adalah pada aktor yang bermain dalam tataran simbol. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yaitu suatu metode yang sumber penelitiannya dikumpulkan melalui kajian pustaka dan lapangan.

Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa : *Pertama*, Bupati Sampit Supian Hadi dalam menjalankan kebijakannya menampilkan simbol-simbol Islam yang termanifestasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah seperti: Pembangunan Kaligrafi asmaul Husna di beberapa jalan protokol, Pembangunan *Islamic centre*, Kubah di setiap kantor Dinas, nuansa Islam di bundaran Belanga (Perdamaian), dan Taman Kota Sampit. *Kedua*, Nilai-nilai yang mengobsesi kebijakan *cultural symbol* tersebut adalah nilai-nilai agama, nilai seni dan kepentingan politik. Nilai-nilai tersebut adalah bentuk dan ekspresi bupati dalam beragama Islam dan implementasi dari artikulasi kognitif sebagai seorang muslim yang sudah terarahkan oleh pemahaman dan pengetahuan terhadap agama dan juga sebagai simbol etika seorang muslim, yang juga dimiliki oleh mayoritas masyarakat Sampit. Hal ini memang tidak terlepas dari kepentingan politik dalam membangun politik identitas bupati Sampit, yaitu agar menarik simpati masyarakat Sampit sebagai modal untuk melanggengkan pemerintahannya, mengingat bupati ini terpilih kembali dan memerintah selama dua periode. *Ketiga* *cultural symbol* ini memberikan pengaruh dan dampak bukan hanya sebagai penambah popularitas bupati Sampit, namun juga untuk pembangunan sampit yaitu sebagai pembuka perubahan, sebagai identitas dan sebagai pembangunan.

Kata kunci : *Cultural Symbol*, Politik Identitas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita yaitu Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Noorhaedi Hasan M.A, M.Phil, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah Ph.D dan bapak Ahmad Rafiq, M.Ag Ph.D selaku ketua dan sekretaris program studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai tesis ini bisa terselesaikan.
5. Segenap Dosen Prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam yang telah memberikan ilmu yang semoga bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.

6. Bapak, umi dan keluarga tercinta atas doa yang selalu dipanjatkan serta perhatian, kasih sayang dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini, hasil karya ananda yang sederhana ini dipersembahkan untuk Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim, khususnya kota Sampit, atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di kota Sampit.
8. Semua stakeholder yang sangat membantu penulis dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini, khususnya Bapak Alan Popy selaku Ketua Bidang Teknik Dinas Pembangunan Umum Sampit yang bersedia penulis wawancarai, begitu juga dengan ibu Wulandari dan ibu Daniarti selaku humas SETDA Sampit, bapak H. Samsuddin selaku ketua Kemenag Sampit, ibu Maria selaku ketua Litbang di BAPPEDA Sampit, bapak Untung selaku pengurus Dewan Adat Dayak Sampit.
9. Segenap warga Sampit yang bersedia penulis wawancarai khususnya bapak Asyad sekeluarga dan bapak Nurul Mubin sekeluarga sebagai salah satu tokoh masyarakat di Sampit, Rahmad S.E selaku tokoh pemuda Sampit, serta semua warga Sampit yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya di sini.
10. Teman-teman seperjuangan di SPPI regular angkatan 2014/2015 yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan selalu menjadi kenangan indah dalam hidup penulis.
11. Suamiku tercinta Nur Rohman M.Hum yang dengan segenap cintanya

terus mendukung, mendorong, menyemangati serta membantuku menyelesaikan tesis ini. Serta malaikat kecilku, anakku Kenzie Arsy.M yang dengan senyumnya memberiku kekuatan luar biasa untuk menyelesaikan tanggung jawabku ini. Kalian adalah segalanya.

12. Seluruh sahabat, staff Prodi dan PPS serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, yang telah memberikan penulis dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tesis inidan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 11 April 2018

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Thau'am Ma'rufah S.S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	v
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISTILAH.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Manfaat dan Kegunaan.....	6
D.Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	13
F.Metode dan Pendekatan.....	31
G.Sistematika pembahasan.....	34
BAB II NILAI-NILAI BUDAYA DAN SIMBOL SAMPIT	
A.Keadaan Sosio Historis Penduduk Sampit.....	36
1. Karakteristik Geografi dan Demografi Sampit.....	36
2. Perkembangan Sistem Budaya di Sampit.....	44
3.Perkembangan Sistem Keberagamaan di Sampit.....	50
B. Profil Singkat Bupati Sampit.....	55
C. <i>Cultural Values</i> sebagai Pijakan dalam Pembangunan.....	58

	D.Simbol sebagai Identitas Politik Elit Sampit.....	61
BAB III	TINDAKAN POLITIK ELIT DAN CULTURAL SYMBOL DALAM PEMBANGUNAN KOTA SAMPIT	
	A.Tindakan Politik Elite Sampit.....	64
	1.Kaligrafi Asmaul Husna di Beberapa Jalan Protokol.....	64
	2. <i>Islamic Center</i>	67
	3.Kubah Hijau di Setiap Kantor Dinas.....	68
	4.Nuansa Islam di Bundaran Belanga.....	70
	5.Nuansa Islam di Taman Kota Sampit.....	72
	B.Tindakan <i>Cultural Symbol</i> Kota Sampit.....	74
BAB IV	<i>CULTURAL SYMBOL</i> SEBAGAI POLITIK IDENTITAS <i>ELITE</i>	
	A.Cultural Symbol sebagai Pembuka Perubahan di Sampit.....	89
	B.Cultural Symbol sebagai Identitas.....	95
	C.Cultural Symbol sebagai Bentuk Pembangunan.....	102
BAB V	PENUTUP	
	A.Kesimpulan.....	108
	B.Saran-saran.....	111
	DAFTAR PUSTAKA.....	112
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISTILAH

Belom Bahadat harus	: Suatu konsep relasi social masyarakat dayak yang artinya
sanksi	Memiliki sopan santun dan tata karma yang diikat oleh Hukum adat.
Huma betang masyarakat	: Bangunan panjang tempat tinggal secara kolektif Dayak pada masa lalu.
Oloh Salam	: Orang dayak yang beragama Islam
Oloh Helu	: Orang dayak yang beragama leluhur
Mamapas lewu	: Upacara bersih-bersih kampung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Para ahli telah bersepakat bahwa simbol mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ernest Cassier mengatakan bahwa “manusia adalah *animal symbolicum*”.¹ Hanya dengan menggunakan simbol-simbol, manusia dapat mencapai potensi dan tujuan tertinggi hidupnya. Masyarakat hampir tidak ada tanpa simbol-simbol. Kesatuan sebuah kelompok dan semua nilai budayanya diungkapkan dengan simbol yang menjadi sarana komunikasi dan pemahaman bersama tentang identitas dan kebudayaan mereka.

Manusia bisa memahami berbagai fenomena di sekitarnya dengan baik melalui pemahaman tentang simbol. Simbol bisa mempunyai pengertian yang relatif lebih luas dan mendalam dalam mengurai fakta dan fenomena. Simbol bisa berbentuk tanda, benda, bahasa, maupun upacara-upacara. Bagi James Dever, simbol adalah sebuah benda atau aktivitas yang melambangkan dan berfungsi sebagai pengganti untuk sesuatu yang lain dan sebuah gambaran oleh sesuatu yang tidak berhubungan secara langsung dengannya.²

Suatu simbol adalah sesuatu yang mempunyai signifikansi dan resonansi kebudayaan. Simbol tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memiliki makna mendalam. *Cultural symbol* yang dimaksudkan dalam tesis ini adalah simbol-simbol yang berpijak pada suatu budaya masyarakat tertentu

¹ F.W Dilliston, *Daya Kekuatan Simbol*, terj. A. Widyatama (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 1.

²James Dever, *Simbol Dalam Kamus Psikologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 476.

dan mampu mempengaruhi pikiran dan tindakan mereka baik secara rasional dan emosional bagi dirinya dan orang lain.³ Simbol sejarah selalu berada pada puncak gunung dari peristiwa bersejarah, legenda-legenda dan sebagainya memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiran dari sebagian besar materi tersebut. Simbol-simbol membantu seseorang untuk mempertajam tingkah laku dan prestasi kebudayaan.⁴ Dalam ranah ini, simbol bukan saja berfungsi sebagai lambang-lambang dan ikon tertentu saja, tapi juga dapat membentuk sebuah politik identitas dalam suatu kelompok masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, sejak bergulirnya reformasi pada 1998 lalu, desentralisasi politik menghadirkan kembali wacana identitas yang selama orde baru mengalami represi oleh penyeragaman bahasa politik, serta membuka ruang politik dan administratif bagi daerah yang sebelumnya memimpikan adanya kebebasan mengatur diri secara otonom, sehingga dapat dijadikan pintu masuk untuk mengeksplorasi energi lokal.

Politik identitas dapat terlihat dari upaya-upaya yang bermula dari sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mulai dari upaya memasukkan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendapatkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan

³ Perkuliahan Etika Politik dan Pemerintahan oleh Pak Subaidi.

⁴ Arthur Asa Berger, *Pengantar Semiotika: Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*, terj. M. Dwi Satrianto (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), 28.

separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk mengejalanya perda syariah, maupun menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu, dengan memunculkan simbol-simbol agama tertentu dalam setiap pembangunannya.

Berangkat dari asumsi tersebutlah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bermula dari kegelisahan penulis akan munculnya simbol-simbol Islam dalam pembangunan di kota Sampit. Seperti diketahui, Sampit adalah ibukota kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, yang dalam lima tahun terakhir ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan demi kemajuan kota. Memang, setelah terpilih menjadi bupati tahun 2010 lalu, Supian Hadi,⁵ menggalakkan pembangunan kota Sampit menjadi kota yang lebih maju. Jika dulu tidak ditemukan plaza ataupun mall satupun di kota Sampit, maka sekarang masyarakat Sampit bisa menikmati gemerlapnya kota dengan pembangunan beberapa infrastruktur seperti ikon patung jelawat, bundaran perdamaian, Masjid agung sampit yang megah dan *Islamic Centre* yang baru saja diresmikan Agustus 2015 lalu.

Namun ada satu fenomena menarik dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kotim, khususnya bupati Sampit, yaitu munculnya simbol-simbol Islam dalam setiap bangunan infrastruktur yang dibangun. Sehingga memberi kesan Supian Hadi selaku bupati Kotim ingin membuat Sampit sebagai kota Islam. Di beberapa jalan-jalan protokol, dipasang

⁵ Bupati sampit yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yang berpasangan dengan Taufik Mukri yang dilantik pada tahun 2010.

papan-papan bertuliskan Arab (asmaul husna) berikut terjemahannya. Tugu perdamaian, yang dulunya didirikan dalam rangka memperingati konflik Sampit, kini dibangun sebuah monumen besar berbentuk kubah dikelilingi oleh tulisan-tulisan Arab, sehingga tugu perdamaian yang hanya terbuat dari tiang ulin terkesan menjadi tenggelam oleh kemegahan monumen tersebut. Selain itu, tiang pagar rumah jabatan pun pada bagian atasnya diberi arsitektur kubah. Seakan ingin memberikan identitas bahwa Sampit adalah ibukota kabupaten Islam.

Fakta-fakta tersebut sangat menarik untuk dikaji, karena jika ditinjau dari keadaan sosio-geografisnya, kota sampit adalah daerah yang heterogenitasnya sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari pola kehidupan masyarakat dari budaya, agama dan karakter perilaku. Akan tetapi dalam perjalanan dinamika politik, aktor-aktor lokal memunculkan dominasi *cultural symbol* tertentu sebagai politik identitas dan simbol-simbol budaya lain, dan yang menarik adalah hal tersebut tidak mendorong terjadinya resistensi budaya dalam ranah konflik, bahkan hal itu lebih mendorong pada popularitas aktor-aktor yang bermain dalam tataran simbol tersebut, terbukti dengan terpilihnya kembali Supian Hadi dan Taufik Mukri sebagai bupati Sampit, pada pilkada di akhir 2015 lalu.

Simbol-simbol Islam yang dimunculkan oleh bupati Sampit, setidaknya mewakili hal tersebut karena sekilas tampak bahwa bupati sampit ingin memberikan image bahwa sampit adalah kota Islam. Dan hal ini menjadi menarik untuk diteliti. Mengapa menarik? Setidaknya ada beberapa alasan,

pertama, Kota Sampit adalah kota yang majemuk dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, dimana terdapat berbagai macam penduduk dengan berbagai macam suku, bahasa dan agama. Dengan penampilan simbol-simbol Islam di ruang publik sampit ini, menurut beberapa teori akan memicu pertarungan identitas, yang berpotensi pada terjadinya konflik, namun dalam kasus sampit, kemunculan simbol ini malah menjadi modal yang mendorong popularitas bupati Sampit, dan mengantarkannya menjadi bupati untuk yang kedua kalinya. *Kedua*, Sampit adalah kota yang tidak mempunyai pengalaman sejarah Islam yang menonjol sebagaimana Tuban di Jawa Timur yang terkenal dengan kota wali karena menjadi salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Atau Gorontalo yang mempunyai memori kolektif,⁶ sehingga menjadikannya provinsi yang kental dengan nuansa islam. Yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa malah simbol-simbol Islam yang dimunculkan ? Mengapa bukan simbol-simbol keetnisan yang lebih relevan dengan budaya lokal di sampit? Dan apa yang mengobsesi bupati sampit dalam memunculkan simbol-simbol tersebut? Apakah hanya karena dia beragama Islam, ataukah karena kepentingan-kepentingan politik yang berkelindang di dalamnya,

⁶ Memori kolektif pertama adalah perjanjian *udulawo limo lo Pahalaa*. Konsesus lokal yang disertai peletakan basis nilai lokal; adati *hulo-huloo to syaraa* (adat yang menundukkan pada syariah), *syaraa hulo-huloo quruani* (Syariah yang mendasarkan pada al-Quran) ini adalah perjanjian yang terjadi pada 1672 yang menjadi akhir dari peperangan antara kerajaan Limboto dan Hulondalo dan menjadi *social stock of knowledge* tersendiri bagi masyarakat Gorontalo dan menjadikan memori awal untuk mengkonsolidasikan peradaban secara kolektif. Lihat. Idris Rahim, "Identitas Etno Religi Dalam Pembentukan Provinsi Gorontalo" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). 7

Dari permasalahan di atas, penulis menfokuskan kajian pada analisis *cultural symbol* yang muncul sebagai politik identitas di Sampit. Dan menganalisis bagaimana permainan *cultural symbol* ini mempunyai kekuatan dalam pembangunan masyarakat sampit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang akan dijawab adalah:

1. *Cultural symbol* apa saja yang menjadi politik identitas dalam pembangunan Sampit?
2. Nilai-nilai apa saja yang mengobsesi tindakan tersebut?
3. Bagaimana proses *cultural symbol* itu sebagai politik identitas dalam pembangunan Sampit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa saja *cultural symbol* yang menjadi politik identitas dalam pembangunan Sampit
2. Dapat menjelaskan nilai-nilai apa saja yang mengobsesi bupati sampit dalam memunculkan simbol-simbol tersebut
3. Dapat menjelaskan proses *cultural symbol* tersebut sebagai politik identitas dalam pembangunan Sampit

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmiah bagi khazanah ilmu politik Islam, khususnya dalam bidang *culture symbol* dan politik identitas elit - elit lokal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting bagaimana *cultural symbol* mempunyai kekuatan dalam membentuk politik identitas elit-elit lokal yang dapat menjadi modal mereka untuk mendorong popularitas mereka di kalangan masyarakat daerah.
3. Diharapkan menjadi salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat memahami dan mengkaji lebih jauh tentang permasalahan yang belum diangkat di dalam penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai pemunculan simbol dalam politik identitas elit lokal, sejauh pengamatan penulis belum ada yang mengkajinya secara mendalam. Walaupun begitu, politik identitas sudah banyak dilakukan oleh para pakar terdahulu. Sebagai pembukaan dalam kajian politik identitas, ada baiknya melirik Kajian oleh Ahmad Syafii Ma'arif dengan judul Politik identitas dan masa depan pluralisme kita.⁷ buku ini adalah orasi ilmiah yang disampaikan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam Nurcholis Madjid *memorial lecture* pada oktober 2009 lalu, yang kemudian dibukukan dengan beberapa tanggapan dari orasinya tersebut. Dalam buku ini, Syafi'i Ma'arif menyoroti munculnya gerakan-gerakan radikal yang berbaju islam sebagai politik identitas mereka. Gerakan-gerakan ini juga anti demokrasi, anti pluralisme dan sampai

⁷ Ahmad Syafi'i Maarif Dkk, "Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita," in *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta: Demokrasi Project, 2012).

batas-batas yang jauh juga anti nasionalisme yang dalam satu hal mereka mempunyai tujuan yang sama, pelaksanaan Islam dalam kehidupan bernegara. Dalam orasinya ini Buya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dengan ancaman penguatan politik identitas di atas, karena pluralisme yang menomorsatukan keberagaman sudah merupakan bagian esensial bagi keindonesiaan. Orasi ini mendapat tanggapan dari tujuh orang lain yang tertuang dalam buku ini. Tujuh orang ini terdiri dari berbagai latar belakang,⁸ seluruhnya ingin memperkuat sendi-sendi pluralisme kita dari ancaman politik identitas.

Selanjutnya, karya Sri Astuti Buchori yang berjudul kebangkitan etnis menuju politik identitas.⁹ Secara umum, buku ini berbicara mengenai fenomena penyelenggaraan praktik berdemokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Gubernur Kalimantan Barat melalui perspektif identitas etnis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif-kualitatif yang memfokuskan penelitian pada munculnya politik identitas etnis Dayak dalam pemilihan umum kepala daerah. Penelitian ini menggunakan teori politik identitas Manuel Castells, multikulturalisme, demokrasi dan desentralisasi.

Dari proses penelitian yang dilakukan, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kebangkitan etnis dalam pilkada Gubernur Kalimantan Barat. Beberapa kesimpulan

⁸ Ketujuh orang tersebut adalah Martin Lukito Sinaga, Siti Musdah Mulia, Eric Hiariej, Asfinawati, Budiman Sudjatmiko, Yayah Khisbiyah dan Tonny D. Pariela.

⁹ Sri Astuti Buchori, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas* (Jakarta: Pustaka Obor, 2014). Buku ini merupakan penelitian ilmiah berupa disertasi dalam ilmu politik yang kemudian dibukukan dan diterbitkan.

tersebut adalah: *pertama*, marginalisasi dan diskriminasi etnis Dayak di Kal-Bar telah menyebabkan ikatan emosional etnis Dayak semakin erat dan kuat; *Kedua*, demokrasi dan desentralisasi pada era reformasi merupakan peluang bagi etnis Dayak untuk berkompetensi dengan mencalonkan tokoh dari etnis mereka; *ketiga*, kemenangan tokoh etnis Dayak dalam pilkada Gubernur Kal-Bar pada tahun 2007 telah menggugurkan *mindset* yang dibentuk oleh kolonial Belanda bahwa Dayak Ulun atau kuli dan oleh orde baru bahwa Dayak pemalas serta tidak produktif; *keempat*, partai politik tidak selamanya menjadi arena perpolitikan handal untuk dapat memenangkan kandidat dalam sebuah kompetisi seperti pilkada. Ada sebuah teori baru yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa: marginalisasi dan diskriminasi yang dialami sebuah etnis dalam kurun waktu yang sangat lama membuat ikatan emosional etnis semakin kuat dan erat, karena adanya *common cause*, *common goal*, *common interest*. Akhirnya memunculkan politik identitas yang merupakan aliran politik dengan melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan agama, etnis dan budaya.

Penelitian selanjutnya adalah disertasi dari Idris Rahim dengan judul Identitas Etno Religi Dalam Pembentukan Provinsi Gorontalo.¹⁰ Fokus penelitian ini difokuskan pada dinamika politik identitas di Sulawesi Utara, identitas yang kemudian menjadi faktor penting dalam pembentukan sebuah teritori baru, yaitu provinsi Gorontalo. Penelitian ini menelaah proses sosial politik yang melingkupi pembentukan provinsi Gorontalo yang dulunya

¹⁰ Rahim, "Identitas Etno Religi Dalam Pembentukan Provinsi Gorontalo."

bergabung dengan Sulawesi Utara. Penelitian ini menggambarkan dinamika penguatan identitas masyarakat Gorontalo sejak zaman prakolonial, kolonial dan pasca kolonial hingga detik-detik pembentukan provinsi Gorontalo. Dari perubahan identitas ini Idris Rahim juga memotret dinamika politik lokal Gorontalo, yang mana identitas menjadi faktor yang ikut diperhitungkan. Idris Rahim juga melihat gerakan masyarakat yang memperjuangkan terbentuknya provinsi Gorontalo, dimana gerakan tersebut dilandasi oleh identitas sosial lokal berupa etno religi yang mengakar, serta mengidentifikasi proses perubahan struktur politik.

Dalam penelitiannya ini Idris Rahim menggunakan pendekatan *historical sociology* dengan menggunakan teori politik identitas dan teori etno religi serta teori gerakan sosial Sidney Tarrow. Penelitian ini memberikan temuan, *pertama* pembentukan provinsi Gorontalo seharusnya tidak hanya menjadi hasil dari proses administrasi politik selama era Orde Baru, tetapi juga menjadi konstruksi identitas pada basis agama etnis yang telah berlangsung sejak masa pra kolonial sampai akhir era Orde Baru. Fragmentasi identitas etnis antara Gorontalo dan Minahasa pada setiap akhir periode semakin intensif. Hal ini juga berlaku sama untuk perbedaan identitas agama, yaitu Islam dan Kristen, selama era kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru. *Kedua*, pembentukan provinsi Gorontalo lebih terbuka ketika merasakan Orde Baru dan wacana desentralisasi terbuka. *Ketiga*, pembentukan provinsi Gorontalo juga didasarkan pada gerakan sosial yang memanfaatkan kesempatan politik, yaitu keterbukaan ruang administrasi untuk memperluas agama. *Keempat*, divisi

regional juga harus didasarkan pada analisis yang komprehensif, bukan hanya karena mobilitas politik dan identitas tetapi karena kebutuhan untuk menyamakan pengembangan.

Selanjutnya penelitian yang menyinggung masalah pengaruh simbol dalam menarik suara pemilih, sebuah tesis yang berjudul “Penggunaan Term dan Simbol Islam sebagai Iklan Politik di Televisi Pada Pemilihan Umum Tahun 2014”.¹¹ Penelitian ini fokus pada pengaruh penggunaan simbol-simbol Islam pada iklan di televisi terhadap persentasi pemilihan Legislatif tahun 2014 lalu. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik dan teopolitika untuk menganalisis datanya. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa term dan simbol Islam yang digunakan sebagai iklan politik di televisi mampu membuat masyarakat sebagai pendulang suara terpengaruh sehingga mampu mendongkrak elektabilitas suara. Iklan itu akan membangun persepsi di masyarakat sebagai efek positif dari interaksi simbol dan politik agama terhadap sosok atau tokoh pilihannya itu. Term dan simbol Islam yang ditampilkan di televisi berpengaruh karena mampu memberi imaging yang kuat sampai masuk ke memori otak sehingga memberi ingatan ketika hari pencoblosan.

Selanjutnya, penelitian yang juga menjadikan simbol sebagai objek penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sarkawi B. Husein dalam bukunya yang berjudul “ Negara di tengah Kota: Politik Representasi dan

¹¹ Muliatul Fajri Akhsan, “Penggunaan Term Dan Simbol Islam Sebagai Iklan Politik Di Televisi Pada Pemilihan Umum Tahun 2014” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Symbolisme Perkotaan (Surabaya 1930-1960)".¹² Secara garis besar, penelitian ini menyoroti keberadaan berbagai simbol di kota Surabaya selama kurun waktu 1930-1960 terus diproduksi, diubah dan dikendalikan, yang mana pokok kajiannya ingin menjelaskan bagaimana simbol-simbol tersebut menjelaskan siapa, bagaimana dan dengan mekanisme apa kota ini dikendalikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sejarah dan menggunakan teori simbol yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa setiap perubahan kekuasaan akan mengakibatkan terjadinya perubahan, penciptaan dan pelestarian simbol-simbol kota. Kedua domain simbol kota yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu domain politik-sejarah dan agama menunjukkan kentalnya pengaruh kekuasaan tersebut.

Penelitian di atas menjadi gerbang awal masuknya penelitian ini dalam menjawab beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab pada pembahasan. Namun, dari penelitian-penelitian di atas dapat dilihat bahwa kajian-kajian politik identitas selama ini, hanya bermain dalam ranah struktural, yang lebih melihat secara struktural budaya masyarakat tertentu, sehingga pendekatan yang mereka pakai adalah pendekatan sosiologis dan sosiopolitik. Jelas berbeda dengan penelitian ini yang bukan hanya kajian tentang politik identitas semata, tetapi lebih menitikberatkan kepada *cultural symbol* sebagai politik identitas dalam pembangunan, yang lebih menitikberatkan pendekatan fungsionalis dan lebih menekankan aktor-aktor yang bermain di tingkat lokal

¹² Sarkawi B. Husein, *Negara Di Tengah Kota: Politik Representasi Dan Symbolisme Perkotaan (Surabaya 1930-1960)* (Jakarta: LIPI Press, n.d.).

dalam membangun politik identitas melalui *cultural symbol*. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain.

E. Kerangka Teori

Beberapa konsep teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme simbolik merupakan aliran sosiologi amerika yang lahir dari tradisi psikologi Amerika seperti William James, James Mark Baldwin dan John Dewey yang telah mempengaruhi sosiolog Charles H. Cooley yang kemudian membantu perkembangan teori psikologi Sosial dalam sosiologi amerika. Menurut diktum Cooley, imajinasi yang dimiliki manusia merupakan fakta masyarakat yang solid dan berfungsi sebagai warisan realitas dunia subyektif. William Isaac Thomas, seangkatan Cooley, menekankan perlunya mempelajari fakta subyektif, namun bukan juga berarti fakta-fakta obyektif harus diabaikan. Psikologi sosial harus menyadari kedua dimensi realitas ini.¹³

Walaupun dalam sejarah interaksionisme simbolik Cooley dan Thomas merupakan tokoh penting, namun hanya George Herbert Mead yang sering dianggap paling berpengaruh dalam perspektif ini. Mead setuju dan mengembangkan suatu kerangka yang menekankan arti penting perilaku terbuka atau obyektif dan tertutup atau subyektif. Menurutnya, perbedaan antara interaksionisme simbolik dengan perspektif naturalis

¹³ Charles Horton, *Sociological Theory and Social Research* (New York: n,d), 193.

terletak pada penekanan aspek-aspek obyektif dan mengabaikan makna subyektif. Sedangkan kaum interaksionisme simbolik menengahkan dimensi-dimensi terabaikan ini ke dalam analisa sosiologis, yaitu analisa aspek-aspek perilaku manusia yang subyektif.

Interaksionisme simbolik pada dasarnya berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek dan ia memberikan perspektif teoritis dengan asumsi dasar bahwa subjek bertindak atas dasar makna yang mereka miliki dan makna tersebut muncul dalam proses interaksi sosial antar mereka sendiri (antar sang aktor). George Herbert Mead yang kemudian dikenal sebagai pencetus awal dari teori ini, sangat mengagumi kemampuan diri sang aktor dalam menggunakan simbol, ia menyatakan bahwa diri sang aktor bertindak berdasarkan makna simbol yang muncul dalam situasi tertentu. Makna dari simbol tersebut yang pada gilirannya membentuk esensi dari interaksionisme simbolik yang menekankan korelasional pada simbol dan interaksi.¹⁴

Simbol-simbol dalam interaksi sosial antara diri sang aktor tersebut serta interaksi sosial sebagai embrional dari masyarakat itu sendiri yang menjadi fokus dari interaksionisme simbolik. Oleh sebab itu, teori ini mempertimbangkan simbol dan detailistik kehidupan sehari-hari dari diri sang aktor, apa simbol ini bermakna (terhadap diri sang aktor), dan bagaimana diri sang aktor berinteraksi satu sama lain.¹⁵ Perspektif ini

¹⁴ Umiarso dan Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1

¹⁵ *Ibid.*, 2.

melihat setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna “buah pikiran” yang disepakati secara kolektif.

Varian-varian dan elemen penting dari interaksionisme simbolik diadopsi dari pemikiran dan pandangan George Herbert Mead. Sedangkan tokoh yang mengumpulkan pemikiran dan pandangan dari Mead tersebut adalah muridnya sendiri yaitu Herbert Blumer, serta di tangannya pula istilah dari interaksionisme simbolik terformulasikan secara utuh dan integral.¹⁶ Para interaksionis simbolik yang mengelaborasi pandangan bahwa diri (*self*) merupakan aktor social, berpendapat bahwa peran “dapat dinegosiasikan” atau didefinisikan secara kolektif. Penjelasan ini berdasarkan lima asumsi yang dibangun sebagai berikut:¹⁷

- a. Asumsi 1, manusia hidup dalam suatu lingkungan simbol-simbol.
- b. Asumsi 2, melalui simbol-simbol manusia berkemampuan menstimulir orang lain dengan cara-cara yang mungkin berbeda dari stimuli yang diterimanya dari orang lain itu.
- c. Asumsi 3, melalui komunikasi simbol-simbol dapat dipelajari sejumlah besar arti dan nilai-nilai, dan karena itu dapat dipelajari cara-cara tindakan orang lain. Masyarakat melalui kulturnya menyediakan seperangkat arti yang sama terhadap simbol-simbol tertentu. Ini syarat bagi berlangsungnya interaksi. Jika arti yang

¹⁶ Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik*, 199

¹⁷ *Ibid.*, 163

sama ini tidak tersedia, maka masyarakat akan terpecah belah menjadi *chaos* dan akan bubar.

- d. Asumsi 4, Simbol, makna serta nilai-nilai yang berhubungan dengan mereka tidak hanya terpikirkan oleh mereka dalam bagian-bagian yang terpisahkan. Tetapi selalu dalam bentuk kelompok yang kadang-kadang luas dan kompleks. Artinya terdapat satuan-satuan kelompok yang mempunyai simbol-simbol yang sama.
- e. Asumsi 5, Berpikir merupakan suatu proses pencarian kemungkinan yang bersifat simbolis dan untuk mempelajari tindakan-tindakan yang akan datang, menaksir keuntungan dan kerugian relative menurut penilaian individual, di mana satu di antaranya dipilih untuk dilakukan.

Dari kelima asumsi tersebut, terdapat prinsip-prinsip dasar interaksionisme simbolik yaitu¹⁸:

- 1) Manusia memiliki kemampuan berpikir yang dibentuk oleh interaksi sosial.
- 2) Manusia belajar tentang makna dan simbol melalui interaksi sosial.
- 3) Manusia dapat mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam interaksi dengan menafsirkan situasi mereka yang sedang mengitarinya

¹⁸ *Ibid.*,

Herbert Blumer mengutarakan tentang tiga prinsip utama interaksionisme simbolik, yaitu tentang pemaknaan (*meaning*), bahasa (*language*), dan pikiran (*thought*). Asumsi teori interaksi Blumer adalah sebagai berikut¹⁹:

- a) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasar pada asumsi internilai simbolik yang dimiliki sesuatu tersebut (kata, benda atau isyarat) yang bermakna bagi mereka.
- b) Makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi social dalam masyarakat manusia.
- c) Makna-makna yang muncul dari simbol yang dimodifikasi dan ditangani melalui proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan simbol-simbol yang digunakan.

Selanjutnya Blumer mengatakan bahwa tindakan manusia tidak disebabkan oleh “kekuatan luar” tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam”, tetapi didasarkan pada pemaknaan atas sesuatu yang dihadapinya lewat proses yang disebut sebagai *self-indication*. Proses tersebut adalah proses komunikasi pada diri individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut.²⁰

Dari sini dapat disimpulkan bahwa interaksionisme simbolik merupakan suatu perspektif dalam teori sosial yang berakar dan berfokus

¹⁹ Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik*, 155

²⁰ *Ibid.*, 159

pada hakikat manusia sebagai makhluk yang rasional. Setiap diri sang aktor pasti terlibat relasi dengan sesamanya yang didasari oleh berbagai dorongan seperti dorongan kebutuhan, ataupun lain sebagainya. Interaksi itu sendiri membutuhkan simbol-simbol tertentu sebagai suatu medium untuk berinteraksi. Simbol-simbol tersebut bisa dalam bentuk bahasa, tulisan atau simbol lainnya yang bisa untuk digunakan serta memiliki sifat yang dinamis dan unik.

2. Konsepsi Simbol

Simbol berasal dari kata *symbolo* yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melempar bersama-sama” melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau konsep objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Simbol dapat berupa gambar, bentuk atau benda yang mewakili suatu gagasan, benda ataupun jumlah tertentu di mana makna atas simbol diperoleh dari kesepakatan bersama dalam memaknai sesuatu.²¹

Dalam perspektif Interaksionisme simbolik, dapat dipahami sejauh mana urgensi simbol mempengaruhi seluruh konsep dasar dan cara kerja perspektif ini. Oleh karena itu, definisi tentang simbol perlu untuk dikaji lebih jauh. Simbol dalam perspektif ini didefinisikan sebagai objek sosial yang digunakan untuk merepresentasikan apapun yang disepakati untuk dipresentasikan. Bisa dikatakan, sebagian tindakan manusia merupakan simbol, karena ditujukan untuk mempresentasikan sesuatu melebihi kesan

²¹ Nila Sastrawati, “Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik,” *Jurnal Ad Daulah* 4. No. 1 (2015). 169.

pertama yang diterima, seperti orang akan tersenyum ketika menyukai lawan bicaranya, atau seseorang menggunakan baju koko untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang shalih. Begitu juga dengan objek lainnya.

Simbol berbeda dengan tanda dan ikon. Simbol merupakan sarana dalam mepresentasikan suatu obyek. Makna yang dihadirkan merupakan hasil kesepakatan terhadap obyek tertentu. Konsepsi simbolisme pada dasarnya merujuk pada penggunaan simbol-simbol sebagai sarana penyampaian pesan, aspirasi serta hasrat. Dunia simbol tidak terlepas dari era dimana penyaluran hasrat manusia tidak dituangkan secara gamlang, tetapi pesan ditampilkan dalam perwujudan yang berbeda atau tidak nyata untuk memberikan makna tertentu terhadap suatu obyek atau pesan itu sendiri. Dengan kata lain terjadi penghalusan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dilekatkan pada simbol yang digunakan.²²

Ada empat ciri khas dari sebuah simbol. *Pertama*, simbol bersifat Figuratif, simbol selalu menunjuk sesuatu di luar dirinya, sesuatu yang tingkatannya lebih tinggi. *Kedua*, simbol bersifat dapat diserap baik sebagai bentuk obyektif maupun sebagai konsepsi imajinatif. *Ketiga*, simbol mempunyai daya kekuatan melekat, apa yang dilihat dan diimajinasikan mempunyai kekuatan untuk menyingkap realitas yang lebih

²² Dillistone, *Daya Kekuatan Simbol*, 34

tinggi atau lebih dalam. Dan yang keempat *simbol* mempunyai akar dalam masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat.²³

Definisi tentang simbol seperti ini membawa pada tiga premis dasar dalam perspektif interaksionisme simbolik, yaitu: *pertama*, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki yang berarti bagi mereka. *Kedua*, makna dari sesuatu tersebut muncul dari interaksi sosial seseorang dengan yang lainnya dan *ketiga*, makna tersebut disempurnakan melalui sebuah proses interpretasi pada saat seseorang berhubungan dengan sesuatu tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kedudukan makna simbol sangatlah urgent, sebab ia menjadi dasar bagi manusia untuk melakukan suatu tindakan.²⁴

Terkait dengan objek penelitian ini yang melihat bangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah menyiratkan suatu simbol tertentu, maka kajian ini masuk ke dalam kajian *cultural symbol* yaitu simbolisasi nilai-nilai tertentu dari suatu budaya, yang diwujudkan dalam seni arsitektur. Dalam kebudayaan ada nilai-nilai yang sesuai dengan situasi sosial, yaitu nilai-nilai yang sering muncul dalam masyarakat dan diteruskan secara turun temurun, yang kemudian nilai-nilai ini diekspresikan oleh seni sehingga mereka dapat terwujud. Sehingga bisa dikatakan bahwa kebudayaan yang tadinya hanya nilai-nilai disimbolkan ke sesuatu yang nyata yaitu karya seni, termasuk arsitektur di dalamnya. *Cultural symbol* tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang

²³ Dillistone, *Daya Kekuatan Simbol*. 127

²⁴ *Ibid.*,

berkembang. Simbol atau pola tertentu pada sebuah bangunan menegaskan posisi sosial orang yang tinggal di dalamnya, atau sosial life yang sudah ada.²⁵

Pengertian *cultural symbol* atau yang biasa disebut lambang budaya, sebenarnya dapat disepadankan dengan pengertian sejumlah kategori fungsi arsitektur yang dikemukakan oleh beberapa ahli lainnya, yaitu:²⁶

Pertama, sebagai fungsi kultural, yaitu bahwa arsitektur yang fungsional secara representatif dapat dilihat sebagai ekspresi dari suatu gejala budaya tertentu. Atau dalam konteks ini arsitektur dapat melambangkan suatu ciri khas budaya tertentu.

Kedua, sebagai fungsi simbolisasi budaya, bahwa semua wujud arsitektur dianggap sebagai simbol budaya yang disepakati bagi masyarakatnya. Arsitektur dengan segala olahannya adalah pengekspresian nilai-nilai dan sistem sosial budaya masyarakat dimana arsitektur itu dihadirkan. Dengan kata lain arsitektur juga diyakini sebagai suatu hasil kebudayaan yang didasarkan pada sejumlah kaidah dan tata nilai, norma, idealisme, kepercayaan dan kondisi sosial masyarakatnya, sehingga bentukan arsitektur tersebut semestinya akan mengekspresikan nuansa budaya yang melatarbelakanginya itu.

Ketiga, fungsi ekspresif dan alusori, menganggap bahwa semua arsitektur memiliki ungkapan ekspresif yang berbeda-beda menurut latar

²⁵ <https://naufalonblog.wordpress.com/2015/07/05/part-2-taman-ghairah-aceh-memaknai-simbol-dalam-arsitektur>.

²⁶ *Ibid.*,

belakang budayanya atau dengan kata lain, dapat mengungkapkan suatu kenangan atau peristiwa tertentu yang melatarbelakanginya

3. Politik Identitas

Secara teoritis politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap individu atau masyarakat, di mana keberadaannya bersifat laten dan potensial, dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Menurut Castells, politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.²⁷

Frans Magnis-Suseno dalam sebuah seminar politik identitas mengungkapkan bahwa politik identitas merupakan sebuah identitas primordial yang menjadi acuan dasar identitas seseorang dan oleh karena itu, orang itu akan mengambil sikap dan keputusan politik dari sudut keuntungan bagi kelompoknya yang sama dengan identitasnya. Apabila identitas primordial itu adalah agama, maka orang itu pertama-tama merasakan diri sebagai warga agama dan bukan sebagai warga negara. Hal ini berarti dengan sendirinya identitas keagamaan menjadi batas perasaan solidaritas dan loyalitas sosialnya. Dengan demikian kebersamaan

²⁷ Castells, *The Power of*, 6-7

kebangsaan akan tanpa arti emosional bagi yang bersangkutan. Dan pada titik ini menjadi jelaslah bahwa bangsa dan negara tidak lagi menjadi sesuatu yang diminati baginya, karena dia hanya bersedia berkorban untuk sesuatu yang memberikan rasa nyaman bagi dia.

Dalam literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*Political identity*) dengan politik identitas (*Political of identity*). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas baik identitas politik maupun identitas sosial sebagai sumber dan sarana politik.²⁸ Sebagaimana dikutip Sri Astuti Buchori, lukmanto mengatakan bahwa:

“Politik identitas adalah tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan pada ras, etnisitas, gender dan kekuasaan.”²⁹

Manuel Castels menyebutkan tiga bentuk pembangunan identitas seperti dikutip oleh Sri Astuti Buchori, yaitu³⁰:

- a. Identitas legitimasi (*legitimizing identity*) yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial, seperti misalnya suatu institusi negara yang mencoba meningkatkan identitas kebangsaan

²⁸ Mohtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal,” *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, No. 1 (2012), 119.

²⁹ Buchori, *kebangkitan Etnis*, 20.

³⁰ *Ibid.*, 23

anggota masyarakat. Institusi tersebut memang telah mendapatkan legitimasi untuk melakukan hal tersebut.

- b. Identitas resisten (*resisten identity*) yaitu sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan dengan adanya dominasi dan stereotipe oleh pihak-pihak lain sehingga membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak yang mendominasi, dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup kelompok atau golongannya. Sebuah terminologi yang disebutkan ketika Calhoun mengidentifikasi munculnya identitas.
- c. Identitas Proyek (*project identity*) yaitu suatu identitas di mana aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan posisi-posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentransformasi struktur masyarakat secara keseluruhan. Hal ini misalnya terjadi ketika sekelompok aktivitis feminisme berusaha membentuk identitas baru perempuan dalam masyarakat, dan akhirnya merubah struktur masyarakat secara keseluruhan dalam memandang peranan perempuan.

Dalam tataran praktis, politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin yang menghendaki kekuasaan, atau mempertahankan kekuasaannya. Politik identitas biasanya digunakan sebagai alat manipulasi untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. Dalam hal ini ikatan kesukuan ataupun agama

menjadi sangat penting, karena dia menjadi simbol yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. Upaya-upaya seperti memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu merupakan beberapa tindakan yang mencerminkan politik identitas.

Dalam kasus Sampit, identitas keagamaan yang dijadikan *cultural symbol* oleh bupati sampit, dapat dikatakan sebagai politik identitas yang dilakukan oleh pemimpin daerah, Karena dia menggunakan identitas agama sebagai sarana mekanisme politik yang dia jalankan. Dan penelitian ini akan menjawab orientasi apa yang mengobsesi tindakan bupati Sampit tersebut.

4. Fungsionalisme

Kajian ini menekankan pada aktor-aktor yang bermain dalam membangun politik identitas melalui *cultural symbol*, oleh karenanya penelitian ini juga memakai teori fungsionalisme, untuk melihat tindakan apa saja yang dilakukan dan bagaimana tindakan itu dapat memberikan dampak terhadap perubahan masyarakat, baik dalam sistem kepribadian, sistem prilaku dan sistem budaya.

Teori fungsionalisme digagas pertama kali oleh Emile Durkheim, Fungsionalis penting lain yang juga membantu membangun teori fungsionalisme dalam ilmu sosial inggris adalah antropolog sosial inggris pada masa antara 1920 dan 1960. Meski pada masa sesudah itu pengaruh fungsionalisme jauh berkurang dalam teori sosiologi, khususnya di luar

Amerika Serikat, pemahaman mengenai alternatif teoritis kontemporer dalam sosiologi harus dimulai dari fungsionalisme. Semakin menonjolnya teori-teori konflik dan teori tindakan sebagai pendekatan-pendekatan utama sosiologi, hanya dapat dipahami dalam konteks kritik yang di mulai terhadap fungsionalisme.³¹

Di tingkat yang paling mendasar, fungsionalisme dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang berusaha menilai suatu tindakan atau proses sosial dalam hal konsekuensi-konsekuensinya terhadap unit sosial yang dianggap relevan dengannya. Akar-akar intelektualnya biasanya mengarah kepada keputusan Herbert Spencer untuk mengikuti pemakaian kata-kata biologis yang menyebut fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh berbagai organ tubuh untuk kehidupan dari satu makhluk hidup atau organisme.³²

Durkheim menganalogikan fungsionalisme sama seperti sistem kerja organisme biologi. Dia menggunakan karya Herbert Spencer untuk menguatkan argumentasinya. Sebagaimana tercermin pada namanya, suatu organisme adalah entitas hidup yang eksistensi dan kesehatannya bergantung pada semua organ-organ yang bekerja sama dengan baik. Dalam tubuh manusia misalnya, semua organ bekerja saling bergantung satu sama lain. Kerja otak bergantung pada kerja paru-paru yang tergantung pada kerja jantung dan seterusnya, dan semua organ (dalam

³¹ PIP Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial, Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, ed. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, n.d.).51.

³² Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik sampai Post Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), 155

kasus tubuh manusia) tidak dapat tergantikan. Setiap organ ada karena memenuhi kebutuhan tertentu tubuh manusia yang tak dapat dilakukan oleh orang lain.³³

Durkheim dan fungsionalis berikutnya berpendapat bahwa suatu sistem sosial bekerja seperti sistem organik di atas. Bagi fungsionalis, institusi-institusi dalam masyarakat, misalnya bentuk tatanan keluarga, tatanan politik, tatanan pendidikan, tatanan keagamaan dan lainnya adalah analog dengan komponen-komponen organisme. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang terintegrasi dan saling bergantung, seperti halnya organ-organ. Alasan mengapa cara berfikir dan bertindak institutional ada dalam masyarakat adalah karena institusi-institusi ini memainkan peranan yang tak tergantikan, atau dengan menggunakan istilah fungsionalis, -melaksanakan fungsi yang diperlukan- dalam memelihara masyarakat dalam keadaan yang stabil dan memuaskan. Dalam hal tubuh manusia, apabila suatu organ gagal berfungsi, maka manusia akan sakit bahkan mati. Bagi fungsionalis kegagalan suatu institusi dalam berfungsi disebut malfungsi dan akan mengakibatkan keadaan sistem sosial yang mirip kondisi di atas. Hilangnya solidaritas sosial, runtuhnya integrasi dan lain sebagainya.³⁴

Penggunaan analogi ini menjelaskan tujuan teori. Tujuannya adalah untuk secara spesifik menunjukkan pentingnya memandang suatu masyarakat yang baik sebagai masyarakat yang terintegrasi dan stabil.

³³ *Ibid.*,52.

³⁴ *Ibid.*,53.

Organisme tidak akan sehat jika unsur-unsurnya berkelahi, saling memakan atau membunuh. Ada kesatuan tujuan dalam organisme seperti mempertahankan, melindungi dan memelihara kesehatan. Demikian pula halnya sistem sosial. Jadi, teori ini menekankan bahwa masyarakat dipandang sebagai fenomena atau sistem sosial yang terpadu dan utuh. Masing-masing komponen yang ada di dalamnya saling mempengaruhi dan menunjukkan fungsi yang saling terkait. Orang atau individu memiliki “kesepakatan” tentang nilai-nilai yang pokok dan diakui bersama sebagai fakta yang harus ada. Oleh sebab itu konsensus sosial muncul dengan kuat, sebaliknya struktur sosial yang ada dipakai sebagai perangkat untuk menilai atau merealisasikan nilai-nilai dan tujuan masyarakat.³⁵

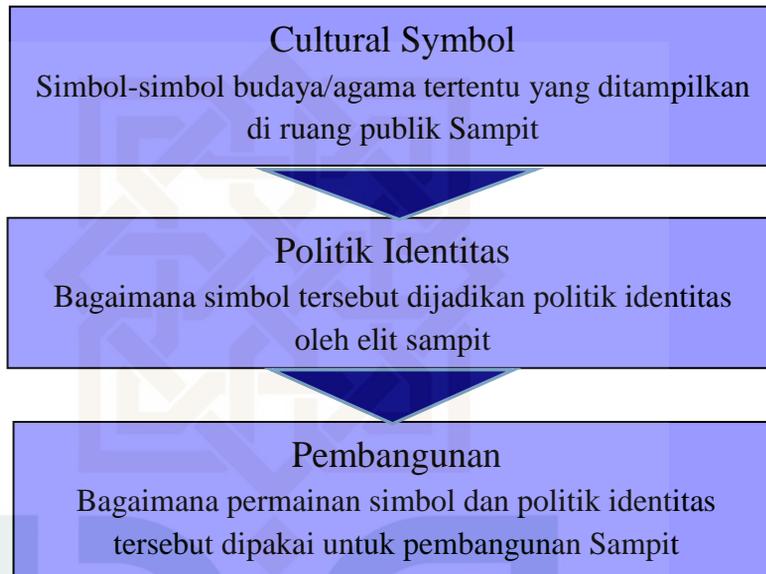
Adapun beberapa karakteristik dari analisis fungsional adalah: *Pertama*, Lebih memperhatikan efek atau dampak suatu aktifitas atau keyakinan ketimbang unsur-unsur dasar penyusunnya. Lebih memperhatikan kerja dari aktifitas atau keyakinan tersebut daripada unsur-unsur aktifitas atau keyakinan; *Kedua*, Penekanan pada kebutuhan untuk keluar dari eksplanasi warga masyarakat yang dikaji mengenai aktivitas mereka untuk mengungkapkan signifikansi fungsional yang sesungguhnya dari keyakinan dan perilaku yang diinstitusionalisasi.³⁶

³⁵ S. Wini Septiarti, “Transformasi Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Strukturalisme-Fungsionalisme Suatu Tinjauan Sosiologis” *Cakrawala Pendidikan* No.3, Tahun XIII, November 1994, 130

³⁶ Turner, *Teori Sosial dari Klasik*, 59

Untuk memudahkan dalam membaca arah penelitian ini dan membaca kerangka kerja teori, penulis menggunakan bagan sebagai berikut:

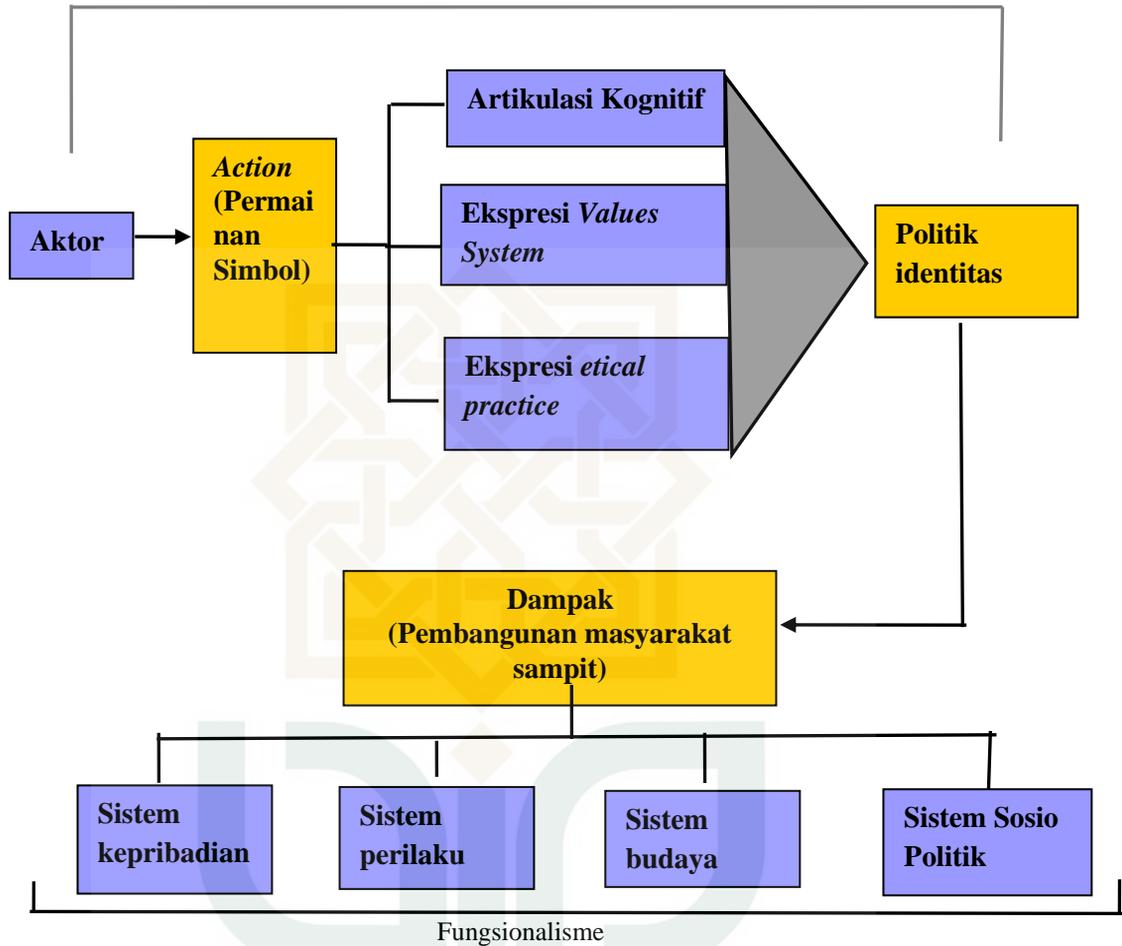
Arah dan Fokus Penelitian



Pada pembahasan pertama penelitian ini akan dipaparkan dan dianalisis simbol-simbol apa saja yang ditampilkan oleh aktor (Bupati Sampit) dalam ruang publik sampit. Simbol ini bisa simbol yang berwujud visual (benda), Audio (bunyi) ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang di dalamnya terdapat makna-makna tertentu. Setelah itu akan dianalisis bagaimana simbol-simbol tersebut kemudian dijadikan identitas oleh bupati tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu sehingga menjadi politik identitas elit atau aktor yang menampilkan simbol tersebut. Dan yang terakhir adalah analisis bagaimana politik identitas yang dimainkan sang aktor menjadi pijakan awal dalam pembangunan kota Sampit.

Kerangka Kerja Teori

Interaksionisme Simbolik



Dari skema di atas dapat dilihat proses cara kerja teori, dan penulis menjadikan skema tersebut sebagai pisau analisis dalam menganalisis penelitian ini. Disitu dapat dilihat bahwa aktor, dalam hal ini bupati sampit melakukan aksi-aksi dan tindakan-tindakan seperti memunculkan simbol-simbol Islam dalam setiap bangunan infrastruktur di kota Sampit. Tindakan ini didasarkan pada *self-indication* bupati Sampit terhadap keadaan sosial masyarakat Sampit, yang kemudian dapat membentuk politik identitas dikarenakan menggunakan simbol-simbol identitas suatu

agama. Bagaimana melihat prosesnya? Yaitu dengan melihat dari aspek artikulasi kognitif, apakah bupati melakukan penyuluhan-penyuluhan struktural mengenai pengembangan identitas Islam pada masyarakat sampit, atau simbol-simbol tersebut tiba-tiba saja muncul hanya sekedar sebagai *ekspresi values system*, yaitu ekspresi nilai-nilai yang dianut saja, atau hanya dalam tataran etika saja, karena sang bupati orang muslim maka dia menunjukkan identitas keagamaannya dengan memunculkan simbol tersebut. Kemudian dari politik identitas berbasis simbol tersebut dilihat apakah membawa dampak pada sistem kepribadian masyarakat, sistem perilaku, sistem budaya dan sistem sosio politik.

F. Metode dan Pendekatan Penelitian

Untuk menjelaskan metode dan pendekatan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Model Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif³⁷ yang sumber penelitiannya dikumpulkan melalui kajian pustaka dan lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi politik dimana titik tekan kajian ini adalah pada aktor-aktor yang memberikan perubahan dalam masyarakat. Penelitian ini mengambil lokasi di Sampit yang merupakan ibukota dari kabupaten kotawaringin Timur,

³⁷ Penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti, yang mempunyai karakteristik yaitu: bersifat induktif, Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian, menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris, dan bersifat humanistik. Lihat Bagong Suyanto, dkk., *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011). 169-170.

namun belum menjadi kotamadya secara terpisah, masih menjadi satu dalam kabupaten kotawaringin Timur. Dan dikarenakan wilayah kabupaten Kotawaringin Timur sangat luas, maka setting lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan dominasi simbol-simbol yang terlihat. Wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalah wilayah yang disana terdapat simbol-simbol yang terlihat secara dominan yaitu kecamatan Mentawa baru Ketapang. Wilayah ini juga dipilih karena merupakan representasi dari wilayah yang tingkat heterogenitasnya tinggi namun simbol-simbol identitas agama ditampilkan diruang publik, oleh Bupati Sampit.

Elit lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bupati Kotim. Bupati yang dimaksud adalah pasangan bupati Supian Hadi dan Taufik Mukri. Mengapa bupati ini? Karena bupati inilah yang gencar-gencarnya melakukan pembangunan dengan memunculkan *cultural symbol* dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Adapun momentum kontemporer yang menjadi fokus studi ini adalah dimulai ketika Supian Hadi dan Taufik Mukri dilantik sebagai Bupati Sampit, pada Juni 2010 sampai pilkada 2015 dimana dia mencalonkan kembali sebagai bupati. Penulis menggunakan pendekatan mikroskopik dimana tidak semua *cultural symbol* yang penulis jadikan sample, penulis hanya mengambil simbol-simbol yang lebih dominan terlihat di kota Sampit.

2. Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data

yang diperoleh dari lapangan melalui penelitian ini, yang diperoleh lewat wawancara mendalam dengan beberapa informan di lapangan, terutama berkaitan dengan berbagai pemahaman individu terhadap *cultural symbol* yang terjadi di sekitarnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah profil penduduk Sampit, termasuk di dalamnya diuraikan persebaran penduduk dan indeks pembangunan manusia dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotim, dan BAPPEDA Kotim selanjutnya diolah dan diinterpretasikan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam penelitian ini. Data sekunder juga diperoleh dari studi kepustakaan dan telaahan terhadap karya tulis lainnya, baik dalam bentuk berita atau artikel yang terbit di media massa kabupaten Kotim, sehingga diperoleh suatu gambaran yang komprehensif berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah penajaman konsep dan menuangkan konsep-konsep itu dalam suatu "*Conceptual Framework*". Dengan demikian, peneliti mempunyai tingkat intensitas pemahaman terhadap suatu konsep atau teori. Penelitian kualitatif dilakukan pada situasi lapangan yang alami (bukan di laboratorium) dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di mana peneliti berinteraksi secara alami dengan subjek penelitian. Kerangka berupa premis, dan premis yang telah dibentuk selanjutna dikaji dan diuji

dengan data empirik di lapangan. Peneliti mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan dan memaknai data yang telah diperoleh di lapangan secara matang, mulai dari awal sampai proses akhir penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Berikut penulis menjelaskan secara umum pokok-pokok yang akan dibahas pada setiap babnya.

Bab I akan berisi proposal penelitian yang meliputi latar belakang dan rumusan masalah penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, telaah kajian kajian yang terkait dengan penelitian ini, landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah, hingga metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II Secara umum, bab ini akan banyak memuat tentang identifikasi kota sampit, sejarah singkat, profil kota, dan keadaan sosial budaya penduduknya. Hal ini diperlukan untuk memotret bagaimana sistem budaya yang ada di sana, kemudian dalam bab ini juga akan dipaparkan profil singkat bupati Sampit.

Bab III dalam penelitian ini mencoba mendiskusikan apa saja pembangunan yang dilakukan bupati sampit dan bagaimana tindakan politik itu *cultural symbol* dan nilai-nilai apa saja yang mengobsesi tindakan tersebut

Bab IV akan membahas bagaimana tindakan politik yang dilakukan bupati Sampit dengan memunculkan simbol-simbol islam di ruang publik

mampu memberikan dampak bagi sistem kepribadian masyarakat, sistem perilaku, sistem budaya dan sistem sosio politik dalam masyarakat Sampit.

Bab V akan berisi kesimpulan yang dihasilkan dari setiap bab-bab yang telah dibahas sebelumnya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pemaparan dari bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bupati Sampit Supian Hadi dalam menjalankan kebijakannya dengan menampilkan simbol-simbol Islam yang termanifestasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Bangunan tersebut menjadi identik dengan seni arsitektur Islam seperti kubah dan kaligrafi. *Cultural Symbol* yang diaplikasikan dalam kebijakan politiknya seperti: pembangunan kaligrafi asmaul husna di beberapa jalan protokol, pembangunan *Islamic centre*, Kubah di setiap kantor dinas, Nuansa Islam di bundaran perdamaian dan taman kota Sampit.
2. Nilai-nilai yang mengobsesi tindakan *Cultural Symbol* tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Nilai Keagamaan, salah satu yang mengorientasi kebijakan *cultural symbol* ini adalah agar masyarakat Sampit tergerak hatinya untuk lebih mengingat Tuhannya dan meminimalisir tindakan kriminal yang dulunya sering terjadi, seperti kebut-kebutan, mabuk-mabukan, pencurian dan perbuatan mesum.
 - b) Nilai Seni, simbol-simbol yang dipakai seperti kubah dan kaligrafi Asmaul Husna maupun kaligrafi tulisan Allah dan Muhammad adalah

ekspresi dari nilai seni arsitektur yang dimiliki bupati Sampit yang dipakai untuk memperindah kota Sampit.

- c) Kepentingan Politik, setiap kebijakan yang dilakukan oleh suatu elit pasti tidak lepas dari kepentingan politik, tidak terkecuali bupati Sampit, yang dalam hal ini adalah untuk melanggengkan kekuasaannya, mengingat bupati tersebut berkuasa selama dua periode ini dan masih berkuasa sampai tahun 2020 nanti.

Nilai-nilai tersebut di atas sebagai bentuk dan ekspresi keyakinan bupati dalam beragama, dan inilah yang disebut artikulasi kognitif dengan menampilkan kubah, kaligrafi dan asmaul husna yang merupakan ekspresi seorang muslim yang selalu menonjolkan simbol-simbol keislamannya dan juga ekspresi seorang muslim yang sudah terarahkan pada pengetahuan dan pemahaman agamanya dan merupakan simbol etika seorang muslim. Hal ini memang tidak terlepas dari kepentingan politik dalam membangun politik identitas bupati.

Dari nilai-nilai yang mengobsesi kebijakan bupati sampit tersebut dapat disimpulkan bahwa *cultural symbol* yang terjadi di Sampit adalah suatu ekspresi keagamaan yang ditampilkan bupati Sampit sebagai nilai yang dimilikinya dan juga mayoritas masyarakat Sampit yang kemudian mampu menggerakkan pembangunan dan loyalitas masyarakat Sampit, sehingga bupati ini mampu melanggengkan kekuasaannya.

3. *Cultural Symbol* dimaknai sebagai simbolisasi nilai-nilai tertentu dari suatu budaya. Dalam hal ini bupati Sampit menggunakan simbol-simbol agama

Islam sebagai identitas politiknya sekaligus menjadikannya alat untuk mendapat dukungan masyarakat Sampit yang memang mayoritas memeluk agama Islam. Politik identitas yang dilakukan bupati Sampit ini bukanlah politik identitas yang terang-terangan memformalkan idealismenya ke permukaan, atau melakukan formalisasi syariah ke dalam kehidupan masyarakatnya seperti membuat undang-undang syariah, mewajibkan pemakaian jilbab untuk wanita atau semacamnya. Sebaliknya bupati sampit menggunakan *soft power* dengan memainkan simbol-simbol Islam yang kemudian mempengaruhi masyarakat sampit secara emosional dan secara tidak sadar mempengaruhi pola pikir dan keberpihakan mereka untuk kemudian mendukung pemerintahan bupati Sampit ini.

Terlepas dari kepentingan politik yang berada dibalik *cultural symbol* tersebut, ternyata simbol-simbol yang ditampilkan bupati Sampit ini memiliki pengaruh dan dampak yang signifikan untuk pembangunan sampit, yaitu:

- a) **Sebagai Pembuka perubahan,** masyarakat Sampit yang dulunya terkenal dengan kekerasan dan isu kerusuhan menjadi masyarakat yang terlihat lebih santun dan agamis. Masyarakat Sampit yang dulunya sering melakukan tindak kriminal di tempat umum, dengan adanya simbol-simbol Islam di fasilitas tersebut, sedikit mengurangi angka tindak kriminal tersebut.
- b) **Sebagai Identitas,** pemunculan simbol-simbol Islam yang meski tidak bertujuan menjadikan Sampit sebagai kota yang islami, tetapi secara

tidak langsung menumbuhkan identitas baru bagi kota sampit yang masyarakatnya lebih agamis dan religius. Bukan lagi kota sampit yang dikenal hanya karena konflik yang pernah terjadi

- c) **Sebagai Pembangunan,** pembangunan yang gencar dilakukan bupati Sampit dengan menambah beberapa infrastuktur seperti *Islamic centre*, Bundaran perdamaian, renovasi taman sampit dan yang lainnya sukses menarik minat para wisatawan dan membuat banyak orang di berbagai daerah bertandang ke sampit yang kemudian memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Sampit menjadi lebih maju.

B. Saran

Penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan beberapa kendala di antaranya beberapa responden sulit untuk ditemui dan beberapa tokoh masyarakat enggan diwawancarai. Sehingga perlu kiranya dilakukan penelitian lanjutan dengan data yang lebih komprehensif.

Mengingat masih minimnya kajian tentang *cultural symbol*, khususnya yang terkait dengan politik identitas elit, maka dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi gerbang awal para peneliti untuk mengkaji lebih jauh terutama untuk kajian yang sifatnya kuantitatif. Sehingga dengan demikian akan lahir karya-karya yang lebih elaborative.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Herman. *Geliat Pembangunan Kota Pekan Baru Menjadi Kota Terkemuka Di Indonesia*. Jakarta: Wahana Semesta, 2009.
- Akhsan, Muliatul Fajri. "Penggunaan Term Dan Simbol Islam Sebagai Iklan Politik Di Televisi Pada Pemilihan Umum Tahun 2014." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Bagong Suyanto, Dkk. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2011.
- Berger, Arthur Asa. *Pengantar Semiotika: Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*. Edited by M. Dwi Satrianto. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Bourdieu, Pierre. *Menyingkap Kuasa Simbol*. Edited by Fauzi Fashri. Yogyakarta: Jala Sutra, 2014.
- Buchori, Sri Astuti. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Pustaka Obor, 2014.
- . *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Pustaka Obor, 2014.
- Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Cooley, Charles Horton. *Sociological Theory and Social Research*. New York, n.d.
- Dever, James. *Simbol Dalam Kamus Psikologi*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Dillistone, F.W. *Daya Kekuatan Simbol*. Edited by A. Widyamataya. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Dkk, Ahmad Syafi'i Maarif. "Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita." In *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Demokrasi Project, 2012.
- Elbadiansyah, Umiarso dan. *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fanzuri, Hamzah. "Politik Pencitraan, Penguasaan Simbol Dan Kekerasan Simbolik Sebagai Alat Reproduksi Kekuasaan." *Www.kompasiana.com*. Last modified 2017. Accessed January 30, 2017. <https://www.kompasiana.com/avantgarde>.

- Fikri, Syahrudin El. *Sejarah Ibadah Menelusuri Asal-Usul, Memantapkan Penghambaan*. Jakarta: Republika, 2014.
- Haboddin, Mohtar. "Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal." *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. No. 1 (2012): 119.
- Herusatoto, Budiono. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: PT. Hanindita, 1998.
- Husein, Sarkawi B. *Negara Di Tengah Kota: Politik Representasi Dan Simbolisme Perkotaan (Surabaya 1930-1960)*. Jakarta: LIPI Press, n.d.
- Jones, PIP. *Pengantar Teori-Teori Sosial, Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Edited by Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Pustaka Obor, n.d.
- Kellner, Douglas. *Budaya Media Cultural Studies, Identitas Dan Politik Antara Modern Dan Post Modern*. Edited by Galih Bondan Rambatan. Yogyakarta, 2010.
- Mahin, Marko. "Kaharingan, Dinamika Agama Dayak Di Kalimantan Tengah." Universitas Indonesia, 2009.
- Maunati, Yekti. *Identitas Dayak*. Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Notapiri, Tilas. *Statistik Daerah KOTIM-2017*. Kotawaringin Timur, 2017.
- Purnawa, Bambang H Suta. "Konflik Antar Komunitas Etnis Dan Representasi Identitas Etnis Di Sampit, Kalimantan Tengah." *www.Danurweda*. Last modified 2016. Accessed April 12, 2016. [www. Danurweda.html](http://www.Danurweda.html).
- Rahayu, Ummu. "Arti Simbol Bundaran Belangan Dan Tiang Tugu Di Dalamnya." *Kotasampit.com*. Last modified 2017. Accessed January 25, 2017. <http://kotasampit.com/post/558/arti-simbol-bundaran-balanga-dan-tiang-tugu-di-dalamnya/>.
- Rahim, Idris. "Identitas Etno Religi Dalam Pembentukan Provinsi Gorontalo." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Ruslan, Heri. "Kubah Simbol Kebesaran Islam." *Www.republika.co.id*. Last modified 2001. Accessed March 9, 2009. <http://www.republika.co.id>.
- Sastrawati, Nila. "Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik." *Jurnal Ad Daulah* 4, no. No. 1 (2015): 169.

Soekanto. *Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sutrisno, Mudji. *Cultural Studies, Tantangan Bagi Teori-Teori Besar
Kebudayaan*. Depok: Koekoesan, n.d.

Turner, Bryan. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2012

